

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum POSITIUM*, 1(1), 83-103.
- Aditya, E. R. (2017). Penerapan Kebijakan Diskresi dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(3), 404-416.
- Aksan, M., Mas, M., & Renggong, R. (2021). Analisis Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap PNS dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 93-96.
- Anwar, A., Saebi, B. A., & Wati, A. (2019). *Sosiologi Korupsi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2016). *Faktor-faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan.
- Bahri, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi dan Modus Korupsi APBD di Malang Raya. *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 449-456.
- Bilondatu, A. A. (2018). Ekspektasi Perempuan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 1(2), 31-41.
- Danil, E. (2016). *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Debski, J., Mosle, S., Jetter, M., & Stadelmann, D. (2018). Gender and Corruption: The Neglected Role of Culture. *European Journal of Political Economy*. doi:10.1016/j.ejpoleco.2018.05.002
- Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN. (2021). *Buku Statistik Pegawai Negeri Sipil Desember 2021*. Badan Kepegawaian Negara.
- Dwiyanto, A. (2003). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Etti, R. S. (2016). Hegemoni Politik Dalam Puisi Dongeng Dari Kerajaan Sembako Karya Acep Zamzam Noor. *DEIKSIS- Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, III(1).
- Fatah, A., Jaya, N. S., & Juliani, H. (2017). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, VI(1), 1-15.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 119-136.
- Garmana, D. H. (2017). Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Journal of Regional Public Administration*, II(1), 20-28.

- Guntara, B. (2020). Maraknya Korupsi di Pemerintahan Daerah dalam Era Desentralisasi. *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1-11.
- Handayani, B. (2018). *Studi kasus penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) pada Pemerintah Kota Malang*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- Harahap, N. A. (2021). Analisis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan ASN Menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural. *Widya Yuridika*, 4(1), 1-16.
- Harits, M., Gozali, V. A., Oktaviani, N. H., & Agustina, K. D. (2019). Trend Korupsi Kepala Daerah; Studi pada Pemerintahan Daerah di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 7(2), 127-137.
- Hsb, A. M. (2019). Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 1-8.
- Hsb, A. M., & Julianthy, E. M. (2018). Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 1-8.
- ICW. (2022, April 18). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. [antikorupsi.org: https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021](https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021) Diakses pada 19 Juli 2022 Pukul 21:09 WIB
- Indonesia Corruption Watch. (2015, Agustus 19). *Pejabat Daerah dan PNS Paling Korup*. from <https://antikorupsi.org/id/article/pejabat-daerah-dan-pns-paling-korup>. Diakses pada 28 April 2022 Pukul 20:18 WIB
- Ismail, M. (2021). Eksistensi Prinsip Good Governance dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Unizar Law Review*, 4(1), 39-48.
- Isnadiva, S. M., & Haryanto. (2021). Hasil Pemeriksaan dan Kasus Korupsi pada Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 83-100.
- Izziyana, W. V. (2016). Korupsi dalam Dimensi Kekuasaan. *Law Pro Justitia*, 1(2), 1-20.
- Juwono, V., & Mayasari, I. (2019, March 14). *Pola Korupsi Pemerintah Daerah dan Pimpinan Transformasional*. KPK: <https://www.kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/782-pola-korupsi-pemerintah-daerah-dan-pimpinan-transformasional>. Diakses pada 18 Maret 2021 Pukul 20:04 WIB
- Kencono, D. S., & Wardhana, B. W. (2013). Perempuan dan Korupsi pada Ranah Publik (Ditinjau dari Gaya Kepemimpinan, Politik, Agama, Psikologi dan Budaya ketimuran). *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 3(2), 84-97.

- Klitgaard, R. (2002). *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Klitgaard, R. (2005). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- KPK. (2006). *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KPK. (2022, Juli 18). *Statistik TPK Berdasarkan Instansi*. [kpk.go.id: https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi](https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi). Diakses pada 19 Juli 2022 Pukul 21:25 WIB
- Labolo, M. (2017). Menutup Celah Korupsi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 43(2), 93-110.
- Mahmuzar. (2020). Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 302-316.
- Martono, N. (2010). *Statistik Sosial Terapan: Teori dan Aplikasi Program SPSS*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Martono, N. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mauliddar, N., Din, M., & Rinaldi, Y. (2017). Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIX(1), 155-173.
- Maunah, B. (2016). Pendidikan dalam Perspektif Struktural Fungsional. *CENDEKIA*, 10(2), 159-178.
- Mukodi. (2017). Korupsi dan Kebangkrutan Sebuah Bangsa. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Abdimas*. LPPM STKIP PGRI Pacitan.
- Muslihudin, & Bahtiar, R. A. (2020). Democracy and Corruption in Indonesia (A Study of Corruption in Indonesia). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 349, 145-149.
- Muslihudin, Hendarto, E., Rostikawati, R., Windiasih, R., & Wulan, T. R. (2018). Relationship between Environmental Damage and Corruption Cases in Indonesia. *ICENIS*, 73(02011), 1-5.
- Ningsi, W. D. (2018). Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penanggulangan Korupsi yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi di DPRD Kota Malang). *Legal Spirit*, 1(2), 109-127.

- Pemerintah Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran RI Tahun 2001 Nomor 134*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran RI Tahun 2014 Nomor 6*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran RI Tahun 2014 Nomor 244*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran RI Tahun 2014 Nomor 292*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Perdani, T. (2019). Perempuan dalam Pusara Korupsi (Perspektif Sosiologi Politik). *Jurnal Interaksi*, III(12), 75-84.
- Pramesti, L., & Haryanto. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 280-344.
- Prasetyo, A. (2018, Agustus 5). *Mengapa Kepala Daerah "Gemar" Korupsi? Ini Kajian KPK*. hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b66f6b800e be/mengapa-kepala-daerah-gemar-korupsi-ini-kajian-kpk?page=1>. Diakses pada 14 April 2021 Pukul 19:50 WIB
- Pratiwi, D. A. (2018). Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik? *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 13-28.
- Pratiwi, N. T., & Adiyaryani, N. N. (2019). Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI) sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, VIII(10), 1-15.
- Putri, Z. (2018, September 05). *Kata KPK Soal Penyebab Korupsi Massal di DPRD Malang*. detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-4199132/kata-kpk-soal-penyebab-korupsi-massal-di-dprd-malang#:~:text=Jakarta%20%2D%20Sebanyak%2041%20anggota%20DPRD,integritas%20para%20anggota%20DPRD%20Malang>. Diakses pada 25 April 2022 Pukul 21:44 WIB
- Rais, M. (2017). Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(1), 121-144.
- Ramadhan, A. (2021, January 28). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia*. Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi->

korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di. Diakses pada 18 Maret 2021 Pukul 16:45 WIB

- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Kencana.
- Rumesten, I. (2014). Korelasi perilaku korupsi kepala daerah dengan pilkada langsung. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 350-358.
- Safira, A. (2018). *Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Oknum Petugas Lembaga Permasalahatan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya (Suatu Kajian Teori Struktural Fungsional menurut Emile Durkheim)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh: Aceh.
- Saputra, A. M., & Revedino, B. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Belanja Daerah (APBD) di Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 1(1), 98-103.
- Satriadin, A., & Syamsudin. (2018). Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi pada Sekretariat Daerah Kota Bima. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(2), 26-36.
- Setiawan, E. N., Maryudi, A., Purwanto, R. H., & Gabriel, L. (2017). Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 142-155.
- Setiawan, I. (2016). Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(1), 29-38.
- Setiyono, B. (2017). Memahami Korupsi di Daerah Pasca Desentralisasi: Belajar dari Empat Studi Kasus. *POLITIKA*, VIII(1), 27-62.
- Shah, A., & Schacter, M. (2004). *Combatting Corruption: Look Before You Leap*. *Finance and Development*.
- Sidi, P. (2014). Krisis Karakter dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(2).
- Simanjutak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111-130.
- Simatupang, P., & Akib, H. (2011). Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1-9.
- Sistianto, M. A. (2011). *Korupsi pada Lembaga Pemerintah (Studi Tingkat Korupsi pada Lembaga Pemerintah di Indonesia)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman: Purwokerto.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politera.

- Sommaliagustiana, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 43-57.
- Suryanto, A. F. (2021). Penegakkan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia. *Dharmasisya*, 1(2), 589-600.
- Thezar, M., & Nurjannah, S. (2020). Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. *Alauddin Law Development*, II(3), 328-338.
- Utami, I. S. (2018). Desentralisasi, Korupsi, dan Tambal Sulam Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 35-46.
- Wijayanto, & Zachrie, R. (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia : Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Yudhapratama, L. (2015). *Korupsi dalam Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta: Istana Media.
- Yunas, N. S. (2016). Kepemimpinan dan Masa Depan Reformasi Birokrasi di Indonesia. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 9(2), 103-114.
- Yuwanto, L. (2015). Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values. *Jurnal Integritas*, I(1), 1-13.

